

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pada tahun 2018, Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan dana sebesar Rp 5.3 Triliun untuk merancang program bantuan sosial bagi warga negaranya. Pada tahun yang sama, alokasi anggaran tersebut meningkat tiga kali lipat (Menkeu, 2019). Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai jenis bantuan sosial, termasuk bantuan sosial rastra dan bantuan sosial pangan non tunai.

Bantuan Sosial merupakan bantuan dalam bentuk uang, barang, atau jasa yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang berada dalam kondisi miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Penyaluran bantuan sosial secara non-tunai dilakukan terhadap bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan keputusan dari pemberi bantuan sosial. Penyaluran bantuan sosial secara non-tunai merupakan bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang mencakup perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar [1].

Program bantuan sosial bertujuan untuk mengurangi penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial (termasuk psikososial dan ekonomi) dari individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami keterpurukan dan rentan secara sosial. Tujuan akhirnya adalah memberdayakan potensi mereka agar tetap dapat menjalani kehidupan yang layak [2]. Persyaratan utama untuk menerima bantuan sosial adalah bagi seseorang, keluarga, kelompok,

atau masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, yaitu mereka yang pendapatannya berada di bawah standar cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup [3][4].

Manusia telah menerapkan berbagai sistem dalam berbagai aktivitas, termasuk dalam proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah hasil dari upaya untuk memecahkan suatu masalah dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan melibatkan masukan dari para pemangku kepentingan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kepentingan bersama. Proses pengambilan keputusan sering digunakan dalam berbagai konteks, seperti di organisasi, institusi, atau keputusan pribadi, tergantung pada kompleksitas masalah yang dihadapi. Dalam upaya mengambil keputusan, seringkali digunakan sistem yang membantu dan mendukung proses ini, yang dikenal sebagai Sistem Pendukung Keputusan (SPK). Sistem Pendukung Keputusan sering diterapkan dalam lingkungan bisnis untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau institusi.[5].

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan komponen penting dari pengambilan keputusan yang tepat dalam lingkungan yang kompleks. SPK biasanya merupakan sistem berbasis komputer interaktif yang menggunakan data, model, dokumen, pengetahuan dan teknologi komunikasi yang diperlukan untuk mendukung orang-orang yang akan memecahkan masalah yang rumit. Hal ini dapat dikembangkan melalui pembelajaran adaptif dan evolusi untuk mengakomodasi perubahan lingkungan yang dinamis dan tidak pasti saat ini dan/atau yang akan

datang [6]. Proses pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan dapat mempengaruhi kinerja perusahaan [7].

Kabupaten Sikka merupakan salah satu kabupaten yang ada di Nusa Tenggara Timur yang memiliki penduduk dengan jumlah 324.252 jiwa (BPS Kabupaten Sikka tahun 2021). Kabupaten Sikka terdiri dari 21 Kecamatan yang meliputi 147 Desa dan 13 Kelurahan. Dinas Sosial Kabupaten Sikka saat ini sudah menggunakan sistem sebagai penunjang proses penentuan penerima bantuan pangan non tunai bagi masyarakat miskin, tetapi setiap desa pada Kabupaten Sikka belum memiliki sistem sebagai penunjang keputusan. Salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah desa di Kabupaten Sikka yaitu dalam pemilihan penerima bantuan dan timbulnya kecurigaan dan sikap protes warga desa terhadap daftar penerima dana bantuan yang tidak tepat sasaran karena sumber data dari Dinas Sosial Kabupaten Sikka bersumber dari desa. Proses penentuan penerima bantuan di setiap desa di Kabupaten Sikka ditentukan dengan cara musyawarah karena di desa belum memiliki sistem sebagai penunjang keputusan. Salah satu tantangan utama bagi pemerintah dalam merencanakan dan meningkatkan pembangunan adalah mengatasi permasalahan kemiskinan. Dampak dari kemiskinan diketahui sebagai hal yang sangat mengkhawatirkan.

Isu kemiskinan adalah salah satu masalah fundamental yang menjadi fokus perhatian pemerintah di setiap negara. Salah satu program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu.

Proses penentuan pemberian bantuan sosial menghadapi kendala karena kurangnya simulasi metode perhitungan dan ketiadaan perangkingan masyarakat miskin di setiap desa di Kabupaten Sikka. Pemerintah menghadapi kesulitan dalam menyalurkan dana bantuan pangan non tunai kepada masyarakat miskin. Untuk mengatasi masalah tersebut, direncanakan pembuatan sebuah sistem pendukung keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pendukung keputusan dalam penyaluran dana bantuan pangan non tunai bagi masyarakat miskin.

Dalam sistem pendukung keputusan, salah satu metode yang akan diterapkan adalah Fuzzy AHP (*Analytical Hierarchy Process*). Metode ini memiliki kemampuan untuk memberikan stimulan kepada pengambil keputusan dan/atau solusi yang cepat dan dapat diandalkan terhadap kriteria-kriteria yang bersifat subjektif dan ketidakpastian bilangan yang direpresentasikan dalam bentuk urutan skala [8]. Oleh karena itu, diperlukan sistem pendukung keputusan menggunakan metode Fuzzy AHP untuk melakukan seleksi penerima bantuan secara cepat dan optimal, serta untuk memperkirakan masyarakat yang pantas menerima bantuan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Diharapkan bahwa hal ini akan mengurangi waktu kerja, mengurangi tingkat subjektivitas dalam penentuan penerima bantuan, menghindari pengulangan penerima bantuan, serta meningkatkan validitas dalam pemilihan penerima bantuan.

1.2.Rumusan Masalah

Perlu adanya sistem pendukung keputusan untuk mengatur proses seleksi penerima bantuan pangan non tunai bagi masyarakat miskin di Kabupaten Sikka, sehingga bantuan tersebut dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan.

1.3.Pertanyaan Penelitian

Bagaimana membangun sebuah sistem pendukung keputusan untuk menentukan penerima bantuan pangan non tunai kepada masyarakat miskin pada setiap desa di Kabupaten Sikka?

1.4.Batasan Masalah

1. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, Indonesia
- 1 Penelitian ini menggunakan metode Fuzzy AHP

1.5.Tujuan dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Membuat sistem pendukung keputusan untuk menentukan penerima bantuan pangan non tunai bagi masyarakat miskin Kabupaten Sikka.

B. Manfaat Penelitian

Meningkatkan efektifitas kinerja Pemerintah Kabupaten Sikka dalam hal ini setiap desa di Kabupaten Sikka dalam membuat suatu

keputusan untuk menentukan penerima bantuan pangan non tunai bagi masyarakat miskin Kabupaten Sikka.

